



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 600.4/239/BUP-LK/XI/2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR  
600.4/28/BUP-LK/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)  
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)  
KAWASAN PERKOTAAN SARILAMAK**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya mutasi dan rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan mutasi, rotasi serta promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa waktu yang lalu, maka berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 600.4/28/BUP-LK/I/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sarilamak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan



Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 600.4/28/BUP-LK/I/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sarilamak;
  2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.3/1250/BKPSDM-LK/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.3/1251/BKPSDM-LK/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.1/1325/BKPSDM-LK/2025 Asisten Administrasi Umum pada Sektetariat Daerah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 600.4/28/BUP-LK/I/2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sarilamak terkait materi Lampiran secara utuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

+

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 November 2025

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
*[Handwritten signature]*  
**SAFNI**

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	14 11-25
--------------------------------	-------------

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 600.4/239/BUP-LK/XI/2025

TANGGAL : 9 November 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 600.4/28/BUP-LK/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN SARILAMAK

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Safni	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Ahlul Badrito Resha, SH	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Herman Azmar, AP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4	Ir. Eki Hari Purnama, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
5	Nopriyadi Syukri, ST	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
6	Win Hari Endi, SE, MM	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua
7	Yuniwal MT, SE	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris I
8	Yudia Hendra, ST	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris II
9	Eka Hanjaya, SH	Fungsional Perancang Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
10	Destamal, ST, M.Eng	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda	Anggota
11	Jeki Mardonal, SSTP, MM	Camat Harau	Anggota
12	Drg. Yenni Irmandriani	Sekretaris Dinas Pangan	Anggota
13	Noviardi, ST	Kabag Teknik Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu	Anggota
14	Gusni Elvira, SKM, MKM	Kabid Penataan dan Penataan PPLH pada DLHPKP	Anggota
15	Rahmat Fajri, SH, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada DLHPKP	Anggota

16	Afriman Jahar, SE, MM	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLHPKP	Anggota
17	Fatma Novita, ST, MM	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DLHPKP	Anggota
18	Yandri Elfira, S.Si, M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
19	Susi Febrianti, SE	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
20	Roza Emildawati, S.Pi	Kabid Perlindungan Usaha Perikanan Dinas Perikanan	Anggota
21	Ichwan Hafni, ST, MM	Kabid Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
22	Joni Indra, S.Sos	Kabid Komunikasi Publik Dinas Kominfo	Anggota
23	Muasril, ST, M.Si	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda	Anggota
24	Irwansyah, SH	Penata Perizinan Ahli Madya pada DPMPSTP	Anggota
25	Nori Anastafia, S.Pt	Fungsional Perencana Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
26	Mulyanis, ST	Fungsional Perencana Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
27	Adi Warman,SP, S.Sos, MM	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHPKP	Anggota
28	Amalia, S.Si, M.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHPKP	Anggota
29	Rifyal Djudal, S.Si	Fungsional Penyuluh Ahli Muda DLHPKP	Anggota
30	Kimiawan Hari, ST, MT	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLHPKP	Anggota
31	Zumrodi, S.Si, MIL	Fungsional Perencana Muda DLHPKP	Anggota
32	Eka Wahyuni, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Labling DLHPKP	Anggota
33	Mila Nurfitria, S.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Labling DLHPKP	Anggota
34	Tri Fadly, A.Md. LLAJ	Teknisi Survey Jaringan Transportasi Dinas Perhubungan	Anggota

35	Dian Kurnia, SP	Fungsional Perencana Muda Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
36	Bora Prasetya, SP	UPT KPHL Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
37	Sasma Roni Parulian Naibo, SKM	Fungsional Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
38	Ayu Mirna Febriani, S.P.W.K	Penyusun Rencana Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
39	Mira Novita, S.Kep	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	Anggota
40	Lucky Setiawan, S.Par	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
41	Mahdi, SP, M.Si, Ph.D	Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	Tenaga Ahli
42	Dr. Ardinis Arbain	Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	Tenaga Ahli
43	Veronika Sriwulantari, ST, M.Si	Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas	Tenaga Ahli

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

BLAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

24/11-25